

Judul : Sehatkan mental warga binaan, DPR sarankan lapas bikin bilik keluarga
Tanggal : Jumat, 25 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sehatkan Mental Warga Binaan

DPR Sarankan Lapas Bikin Bilik Keluarga

SENAYAN mendorong optimalisasi fungsi bilik asmara di lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai sarana pemenuhan hak-hak warga binaan. Tujuannya untuk menghindari praktik seksual yang menyimpang.

Anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo mengatakan, keberadaan bilik keluarga perlu dikelola secara jelas agar dapat mendukung pembinaan dan proses reintegrasi sosial warga binaan. Karena pembinaan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan keterampilan, tetapi perlu memperhatikan berbagai aspek kehidupan mereka. Seperti hubungan dengan keluarga dan kebutuhan biologis selama menjalani masa pidana.

"Semua permasalahan yang ada terkait warga binaan perlu kita cermati. Tidak cukup pembinaan itu hanya disuruh nanam sayur atau disuruh latihan nari," ujar Yanuar di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurut Yanuar, pemenuhan kebutuhan warga binaan perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk aspek rohani, spiritual, kesehatan, serta hubungan dengan pasangan dan keluarga. Karena itu, keberadaan bilik keluarga perlu tata kelola yang mampu menjawab kebutuhan tersebut

secara aman dan terukur.

Yanuar mengungkap adanya informasi mengenai praktik pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan yang berlangsung secara informal di lingkungan lapas. Seperti penggunaan alat bantu seksual secara bergantian tanpa proses sterilisasi yang memadai. Persoalan tersebut perlu dibahas secara terbuka agar tidak berlangsung tanpa mekanisme dan standar kesehatan yang jelas. "Jadi aspek kesehatan perlu menjadi bagian penting dalam pengelolaan fasilitas dan pelayanan bagi warga binaan," tandasnya.

Sebelumnya, kata dia, bilik keluarga sudah ada dan berjalan di lapas. Biasanya menggunakan salah satu ruangan di lapas atau menggunakan ruang kepala lapas (kalapas). "Tapi (warga binaan) enggak ada yang berani *speak up* (berbicara). Ini terjadi kok, kita ingin angkat dan munculkan di permukaan dan akan diatur," ucap politisi PKS ini.

Selain itu, ia meminta adanya ruangan khusus yang dapat digunakan warga binaan bersama pasangan sahnya. Yang dalam pembahasan publik kerap disebut sebagai "bilik asmara". Hal tersebut bukan semata persoalan kebutuhan seksual, tetapi



Yanuar Arif Wibowo

berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental serta keberlanjutan hubungan keluarga.

"Ini bukan soal tabu, tapi bagaimana kita membuat seluruh warga binaan ini sehat, bukan hanya fisik, tapi mental dan orientasi seksualnya," tandas legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Oleh karena itu, Yanuar meminta jajaran pemasyarakatan menyampaikan kebutuhan regulasi apabila masih terdapat aspek yang belum memiliki aturan yang jelas. Karena pengelolaan bilik keluarga dan bilik asmara perlu ditempatkan dalam kerangka pemenuhan hak keluarga dan mendukung kesiapan warga binaan untuk kembali ke

masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara meminta Pemerintah segera menuntaskan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi turunan tersebut dibutuhkan untuk memberikan kepastian dalam pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan.

Dia menyebut, salah satu pemenuhan hak warga binaan, terutama berkaitan dengan cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga. Ketentuan mengenai hak tersebut perlu didukung aturan teknis yang tegas agar penerapannya memiliki standar yang sama di setiap unit pemasyarakatan.

"Jangan sampai hak yang sudah diatur dalam undang-undang justru menghadapi kendala dalam pelaksanaannya karena aturan turunannya belum terdida secara jelas," kata Dewi di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Karena itu, Dewi menekankan, PP ini perlu segera diselesaikan agar ada kepastian hukum dan standar pelaksanaan yang sama. Apalagi regulasi pelaksana memiliki posisi penting dalam menerjemahkan ketentuan UU Pemasyarakatan ke

dalam praktik di lapangan.

"Dengan adanya aturan yang jelas, jajaran pemasyarakatan memiliki pedoman yang seragam dalam menjalankan pelayanan dan memenuhi hak-hak warga binaan," harap politisi Golkar ini.

Dewi menambahkan, UU Nomor 22 Tahun 2022 telah membawa pendekatan yang menempatkan pemenuhan hak serta perlakuan manusiawi terhadap warga binaan sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Karena itu, implementasinya perlu ditopang dengan regulasi yang mampu memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Kepastian aturan, lanjut dia, tidak hanya diperlukan oleh petugas pemasyarakatan, tetapi juga warga binaan dan keluarganya. Dengan mekanisme yang jelas, setiap pihak dapat memahami prosedur dan persyaratan dalam memperoleh hak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

"Kita dorong bukan hanya percepatan regulasinya, tetapi bagaimana aturan tersebut nantinya benar-benar bisa memberikan kepastian, transparansi, dan perlakuan yang seragam di seluruh Indonesia," imbih legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini. ■ TIF